

IMPLEMENTASI PROGRAM KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DI DESA GUNUNG RIUT KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

Siti Khadijah¹, M.Husaini², Sugianor³
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : sitikhadijah30304@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan berkaitan dengan implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan meliputi masih banyaknya petani yang memiliki lahan tetapi tidak termasuk dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan Aparat Desa dan sumber daya sarana pertanian yang masih terbatas. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara *Snowball Sampling*, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kurang baik dilihat dari indikator Pertama, pada aspek kondisi lingkungan. Kedua, pada aspek hubungan antar organisasi, Ketiga, pada aspek sumber daya, Keempat, pada aspek karakter institusi implementor. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi faktor pendorong yakni informasi yang cukup memadai dalam proses pendataan, kemudian faktor penghambat meliputi masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dikarenakan keterbatasan anggaran, minimnya sosialisasi program bantuan, tingginya angka kemiskinan masyarakat desa dan pengawasan yang kurang baik terhadap proses pendataan masyarakat dan koordinasi yang rendah antara pemerintah dengan aparat desa setempat dan pembinaan yang kurang dilakukan.

Kata kunci: Implementasi, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

ABSTRACT

Problems related to the implementation of the Sustainable Food House Program (KRPL) in Halong District, Balangan Regency include the large number of farmers who own land but are not included in the Sustainable Food House Area (KRPL) program, collaboration between the Balangan Regency Food Security, Agriculture and Fisheries Service and Village Officials and agricultural infrastructure resources are still limited. The aim of the research is to determine the implementation of the Sustainable Food House Program (KRPL) in Halong District, Balangan Regency and the factors that influence it. The research method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Determining informants using Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research state that the implementation of the Sustainable Food House Program (KRPL) in Halong District, Balangan Regency is not good in terms of the first indicator, in terms of environmental conditions. Second, on the aspect of inter-organizational relations, Third, on the aspect of resources, Fourth, on the aspect of the character of the implementing institution. The influencing factors include the driving factors, namely adequate information in the data collection process, then the inhibiting factors include the fact that there are still poor people who have not received assistance due to budget limitations, minimal socialization of aid programs, high poverty rates in village communities and poor supervision of the process. community data collection and low coordination between the government and local village officials and inadequate guidance.

Keywords: Implementation, Sustainable Food House Area (KRPL)

PENDAHULUAN

Indonesia dengan julukan sebagai Negara agraris, kaya akan ketersediaan pangan dan rempah beranekaragam karena letak geografisnya serta kondisi iklim yang sangat menunjang. Seperti kebun, pada umumnya kebun di Indonesia biasanya berisi tanaman buah, sayuran, bumbu masak, obat-obatan atau biofarmaka dan rempah-rempah yang sering disebut dengan dengan tanaman hortikultura.

Kebijakan Pemerintah berupa subsidi benih bibit unggul atau lebih dikenal dengan sebutan Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sangat membantu petani dalam memperolehnya dikarenakan bibit yang unggul memiliki harga yang relatif mahal. Kebijakan subsidi akan membantu petani untuk mengurangi input sehingga *output* yang dihasilkan dapat maksimal. Kebijakan tersebut juga tidak akan menguntungkan petani apabila petani tidak memiliki wawasan seputar benih yang unggul. Petani harus mengetahui bagaimana benih yang unggul dan bagaimana cara memperolehnya agar suatu saat apabila terjadi kelangkaan benih, petani dapat menciptakan benih unggul sendiri. Benih unggul dapat meningkatkan produksi. Kebijakan subsidi bibit unggul juga dirasa masih kurang merata masih banyak petani yang belum mendapatkan subsidi tersebut.

Pemerintah telah banyak mencanangkan program parsial sektoral untuk mendorong pembangunan perekonomian masyarakat perdesaan. Program atau proyek yang digulirkan secara umum berupa bantuan fisik kepada masyarakat, seperti sarana irigasi, pembangunan sarana air bersih, mesin pompa, dan sarana produksi pertanian. Sebagian besar proyek dalam kenyataannya tidak mencapai tujuan yang maksimal dan tidak berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan secara parsial sektoral dengan membentuk kelembagaan baru. Kelembagaan baru ini bersifat *top down*, sehingga merusak tatanan kelembagaan yang ada dan keberlanjutan kelembagaan baru tersebut umumnya rendah. Desa dan masyarakat diposisikan sebagai obyek pembangunan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Kondisi ini menyebabkan sikap apatis masyarakat perdesaan, karena dinilai kurang kompeten untuk mengelola desanya sendiri. Ego sektoral dari berbagai lembaga dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan juga menghilangkan faktor sinergitas dan keterpaduan, sehingga tidak hanya terkesan tumpang tindih, tetapi juga keefektifan dan efisiensi dalam implementasinya sangat rendah.

Sektor pertanian berkontribusi terhadap PDB, mengentaskan kemiskinan, menghasilkan devisa melalui ekspor barang-barang unggulan, dan menjamin ketahanan pangan nasional. Hal ini juga memberikan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat, khususnya di pedesaan. Dinas Agribisnis memutuskan program, strategi, pedoman, prinsip dan standar yang berkaitan dengan program perbaikan pedesaan masyarakat. Program peningkatan pertanian digambarkan sebagai kegiatan yang mempertimbangkan pemberian aset sebagai aset biasa, manusia, modal, inovasi, keadaan dalam dan luar, pedoman, kemajuan, pekerjaan terbatas dan wewenang.

Karena harga benih unggul relatif mahal, kebijakan pemerintah berupa subsidi atau Program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sangat membantu petani dalam memperolehnya. Strategi sponsorship akan membantu peternak dengan informasi yang semakin berkurang sehingga hasil selanjutnya dapat ditingkatkan. Petani juga tidak akan mendapatkan manfaat dari kebijakan ini jika mereka kurang memiliki pengetahuan tentang benih unggul. Peternak harus memahami benih apa yang lebih baik dan bagaimana cara mendapatkannya sehingga suatu saat jika terjadi kekurangan

benih, peternak dapat membuat sendiri benih unggulannya. Menghasilkan lebih banyak bisa dilakukan dengan benih unggul. Strategi sponsorship bibit unggul juga dirasakan masih belum tersosialisasikan secara merata, masih banyak peternak yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program parsial sektoral. Seringkali program atau proyek yang dijalankan melibatkan pemberian bantuan nyata kepada masyarakat, seperti pembangunan sarana irigasi, sarana air bersih, mesin pompa, dan sarana produksi pertanian. Faktanya, sebagian besar proyek gagal mencapai potensi penuhnya dan tidak dapat bertahan lama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan program atau tugas, antara lain:

1. Ketidakesesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat
2. Paket usaha tidak dilengkapi dengan kemampuan pendukung,
3. Tidak ada latihan observasi yang tertata di tingkat masyarakat
4. Belum ada lembaga yang mendorong keberlanjutan program.

Latihan penguatan kelompok masyarakat kota dilakukan berdasarkan wilayah dengan membentuk lembaga-lembaga baru. Pendirian baru ini bersifat *top down*, sehingga merugikan permintaan kelembagaan saat ini dan dukungan terhadap organisasi baru ini sebagian besar rendah. Kota-kota dan jaringannya ditempatkan sebagai objek perbaikan dengan tingkat kepentingan wilayah lokal yang sangat rendah. Masyarakat pedesaan menjadi apatis akibat kondisi ini karena dianggap kurang mampu mengelola desanya sendiri. Selain itu, faktor sinergi dan integrasi tersingkirnya ego sektoral berbagai institusi dalam melaksanakan pembangunan di perdesaan, sehingga tidak hanya menimbulkan kesan tumpang tindih, namun juga sangat rendahnya tingkat efektifitas dan efisiensi.

Kajian ini penting karena mengkaji program Kementerian Pertanian dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan yang telah dilaksanakan selama sepuluh tahun terakhir, sebagaimana diuraikan di atas.

Program pendekatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penciptaan pertanian di Kabupaten Balangan, serta mampu berkontribusi langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang baru saja diuraikan menunjukkan bahwa ada tiga aspek krusial yang dapat digunakan untuk mendorong ketersediaan stok lebih banyak dan stabilisasi harga produk pertanian..

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/KPTS/RC.110/J/01/2017 Tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2017, diketahui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari:

1. Penetapan Lokasi, Penerima Manfaat dan Pendamping.
2. Koordinasi, Pendampingan dan Pelatihan.
3. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah:
 - a. Tahap Penumbuhan
 - b. Tahap Pengembangan
 - c. Tahap Kemandirian

Berdasarkan pengamatan penulis di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan selama ini dalam pelaksanaan program pertanian masih tergolong belum optimal, hal tersebut dilihat dari beberapa aspek permasalahan yang ditemui, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya petani yang memiliki lahan tetapi tidak termasuk dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diketahui dari data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan pada Desa Gunung Riut hanya terdapat 1 Kelompok Tani

beranggotakan 15 orang sedangkan masyarakat atau petani yang belum termasuk dalam program ini jumlah lahan pertaniannya tergolong banyak atau berpotensi untuk menjadi objek tanam dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari hal ini disebabkan kuota bantuan setiap tahunnya terbatas untuk 1 atau 2 kelompok tani di setiap desanya.

2. Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dengan Kelompok Tani Desa Gunung Riut yang menjadi objek bantuan Rumah Pangan Lestari dalam hal koordinasi dan pembinaan teknis tergolong kurang khususnya terkait pelaksanaan Program KRPL yang meliputi Koordinasi, Pendampingan dan Pelatihan, Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah seperti Tahap Penumbuhan dan Tahap Pengembangan meliputi Pengadaan aneka bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian, Pengadaan peralatan dan media tanam seperti polybag, pot, rak, kompos, pupuk, gembor, dll.
3. Sumber daya sarana pertanian yang masih terbatas dilihat dari masih kurangnya sarana penunjang pertanian seperti pupuk, polybag, pot, rak, peralatan pengairan sederhana, dan sarana pendukung lainnya seperti tractor untuk pengolahan lahan pertanian yang belum tersedia sehingga masih dilakukan cara tradisional.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan”**.

METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Harbani Pasolong, 2013:161) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah strategi eksplorasi yang digunakan untuk memeriksa keadaan barang normal, bukan dengan mencoba, dimana ilmuwan sebagai instrumen kuncinya, metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah triangulasi (campuran), pemeriksaan informasi bersifat induktif dan akibat pemeriksaan subyektif menggarisbawahi makna yang bertentangan dengan spekulasi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

Data primer adalah data pokok yang digali dari responden penelitian tentang Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 15 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis yang digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan yakni Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani dkk (2020:163) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan *membercheck*. (Sugiyono, 2015:270-277).

PEMBAHASAN

Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

1. Kondisi Lingkungan

a. Kondisi Geografi

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam kondisi geografi yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi geografi dalam implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tersebut dapat kita lihat pada penjelasan berikut:

Kondisi geografis terkait Pelaksanaan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) tergolong cukup baik karena wilayah yang mendukung dalam rangka pertanian dan wilayah Kecamatan Halong merupakan wilayah dataran tinggi/ pegunungan.

b. Kondisi Sosial

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam kondisi sosial yang tidak sesuai terhadap upaya pencapaian tujuan.

Kondisi sosial menjadi masyarakat Desa Gunung Riut tergolong kurang baik diketahui bahwa cukup banyak masyarakat yang tidak bekerja sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari diketahui mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah Petani/Pekebun dengan jumlah 188 KK orang dari 485 KK dapat dikatakan secara kondisi sosial penduduk cocok sebagai objek penerima bantuan.

c. Kondisi Ekonomi

Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika di implementasikan dalam kondisi ekonomi yang tidak sesuai terhadap upaya pencapaian tujuan.

Kondisi ekonomi masyarakat tergolong kurang baik dilihat dari aspek tingkat pendapatan masyarakat Desa Gunung Riut tergolong menengah kebawah dengan adanya Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menjadikan masyarakat yang menganggur terbantuan namun memang belum dapat menyeluruh karena keterbatasan anggaran.

2. Hubungan antar organisasi

a. Kerjasama Antar Organisasi Pelaksana kebijakan

Kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan merupakan hubungan antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan program.

Kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan kurang baik dikarenakan rendahnya koordinasi antara petugas dengan aparat desa diketahui dari hasil pendataan yang masih kurang sesuai masyarakat kurang memberikan informasi yang mendetail berkaitan dengan

kriteria penerima bantuan hal tersebut disebabkan kurangnya kunjungan dari petugas ke wilayah desa.

b. Koordinasi

Koordinasi antar instansi merupakan hubungan antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan suatu kebijakan program.

Koordinasi antar Tim Teknis Kabupaten dengan Tim Teknis Provinsi kurang baik dikarenakan rendahnya koordinasi diketahui dari hasil pendataan yang masih kurang sesuai masyarakat kurang memberikan informasi yang mendetail berkaitan dengan kriteria penerima bantuan hal tersebut disebabkan kurangnya kunjungan dari petugas ke wilayah desa untuk Penetapan lokasi dan penerima manfaat.

3. Sumber Daya

Sumber daya, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh implementor dalam menunjang pelaksanaan implementasi di lapangan maupun di dalam organisasi itu sendiri.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan petugas dalam pelaksanaan program bantuan.

Sumber daya manusia tergolong kurang baik dilihat dari kurangnya jumlah petugas untuk melakukan pendataan menyebabkan pelaporan data tergolong lambat karena setiap pendamping bisa bertugas tidak hanya pada satu desa saja selain itu sumber daya Gapoktan juga terbatas dari aspek struktur kepengurusan yang kurang efektif dalam rangka pelaksanaan pembinaan maupun pengawasan.

b. Sumber daya finansial

Sumber daya finansial dalam hal ini keterkaitan anggaran yang disalurkan kepada penerima bantuan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sumber daya finansial cukup optimal dan memadai dilihat dari ketersediaan anggaran bantuan tidak ada kendala karena setiap kelompok tani penerima bantuan menerima bantuan yakni sebesar Rp. 85.000.000,-.

c. Sumber daya prasarana

Sumber daya prasarana berkaitan dengan ketersediaan prasarana penunjang proses pelaksanaan bantuan, baik tempat dan lain sebagainya.

Kondisi sarana prasarana penunjang pelaksanaan program tergolong kurang baik untuk kegiatan pertanian karena masyarakat masih bertani dengan cara tradisional hal ini disebabkan bantuan pemerintah dalam bentuk sarana prasarana seperti unit traktor belum ada.

4. Karakter institusi implementor

Tercapainya tujuan, yaitu dilihat dari cara pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui kegiatan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

a. Kemampuan Melaksanakan Program

Kemampuan petugas dalam pelaksanaan program merupakan aspek penting dalam mensukseskan pencapaian tujuan dilihat dari aspek pengetahuan maupun kompetensi yang dimiliki petugas pelaksana.

Kemampuan petugas dalam pelaksanaan program KRPL ini tergolong kurang baik karena dalam jadwal pelaksanaan cukup banyak yang kurang termonitoring seperti Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian namun dalam hal koordinasi antara pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten

Balangan dengan Gapoktan serta Aparat Desa dalam hal penyaluran bantuan dan sosialisasi jenis bantuan dan cara pemanfaatannya, Pendampingan dan Pelatihan upaya penanaman bibit, penggunaan pupuk dan lain sebagainya belum dapat terlaksana secara menyeluruh.

b. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi dalam pelaksanaan suatu tugas merupakan aspek penting agar ranah dalam pelaksanaannya sesuai dengan tanggungjawab kerja masing-masing petugas.

Petugas dalam pelaksanaan program KRPL ini cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program KRPL tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan) terdiri dari faktor pendorong dan penghambat, ada beberapa faktor yang berperan sangat signifikan berkaitan dengan hal tersebut yakni:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan) dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. Tersedianya Anggaran Program

Ketersediaan anggaran program dalam hal ini keterkaitan anggaran yang disalurkan kepada penerima bantuan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Sumber daya finansial cukup efektif dan memadai dilihat dari ketersediaan anggaran bantuan tidak ada kendala karena setiap kelompok tani penerima bantuan menerima bantuan yakni sebesar Rp. 85.000.000,-.

b. Informasi Yang Cukup Memadai Dalam Proses Pendataan

Informasi yang cukup memadai tersebut berkaitan dengan sasaran yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan mencakup wilayah maupun objek individunya dalam hal ini pemerintah dan aparat desa serta masyarakat sangat terbuka dalam berbagi informasi mengenai perkembangan program bantuan yang dijalankan.

Koordinasi antara aparat desa dengan pemerintah khususnya mengenai informasi masyarakat yang membutuhkan dan layak menerima bantuan yakni masyarakat yang tergolong miskin di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong menerima Rumah Pangan Lestari (KRPL).

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan) dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

a. Masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan

Masih banyaknya petani yang memiliki lahan tetapi tidak termasuk dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diketahui dari data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan pada Desa Gunung Riut hanya terdapat 1 Kelompok Tani beranggotakan 15 orang sedangkan masyarakat atau petani yang belum termasuk dalam program ini jumlah lahan pertaniannya tergolong banyak atau berpotensi untuk menjadi objek tanam dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari hal ini

disebabkan kuota bantuan setiap tahunnya terbatas untuk 1 atau 2 kelompok tani di setiap desanya.

Sasaran kurang efektif dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan tergolong tidak mampu dan menganggur hanya saja masih ada sebagian masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena keterbatasan anggaran dan pengalokasian.

b. Minimnya Sosialisasi Program Bantuan

Minimnya sosialisasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong menyebabkan kurang pahami masyarakat tentang bagaimana proses penyaluran bantuan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pembahasan berikut ini:

Sosialisasi dari Pemerintah mengenai Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menjadi belum optimal karena adanya musibah banjir sehingga kunjungan-kunjungan ke tempat binaan kurang dapat dilakukan.

c. Pengawasan yang kurang optimal terhadap proses pendataan masyarakat miskin penerima bantuan hingga penyaluran bantuan

Pengawasan yang kurang efektif terhadap proses pendataan masyarakat miskin penerima bantuan hingga penyaluran bantuan, hal ini disebabkan kerjasama antara Aparat Desa dengan Pemerintah Daerah dalam mengawasi program bantuan tersebut.

Pengawasan tergolong belum optimal dikarenakan kurang dilakukan secara intensif dan disebabkan pula kerjasama antara aparat desa dengan Pemerintah Kecamatan jarang berkoordinasi khususnya dalam hal pendataan masyarakat yang terdampak Musibah banjir untuk penyaluran bantuan.

d. Pembinaan yang kurang dilakukan

Pembinaan dalam pelaksanaan program merupakan aspek penting dalam mensukseskan pencapaian tujuan dilihat dari aspek pembinaan petugas pelaksana dalam kegiatan KRPL tersebut.

Petugas tergolong kurang optimal karena dalam hal pembinaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan sehingga kurang termonitoring seperti Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian.

e. Cuaca yang kurang mendukung dalam kegiatan pertanian

Cuaca yang kurang mendukung dalam kegiatan pertanian dapat menyebabkan realisasi program KRPL menjadi terhambat.

Target penanaman tidak optimal karena sebagian benih Cabe Rawit, Benih Sop, Terong dan Lombok besar yang dibagikan tidak berkembang dikarenakan kondisi cuaca dan kesuburan tanah yang kurang baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dinilai kurang baik dilihat dari: *Pertama*, pada aspek kondisi lingkungan meliputi kondisi geografis di Desa Gunung Riut yang cukup baik seperti akses jalan yang memadai dan ketersediaan pekarangan untuk pelaksanaan kegiatan pertanian, kondisi sosial masyarakat cukup baik dan sudah tepat sebagai penerima bantuan karena mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani/pekebun sehingga cocok sebagai objek penerima bantuan KRPL diketahui

bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Gunung Riut Kecamatan Halong Kabupaten Balangan adalah Petani/Pekebun dengan jumlah 188 KK orang dari 485 KK, kondisi ekonomi masyarakat masyarakat tergolong kurang baik sehingga sudah tepat untuk mendapatkan bantuan diketahui di Desa Gunung Riut tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas petani yang tergolong menengah kebawah. *Kedua*, pada aspek hubungan antar organisasi meliputi kerjasama antar organisasi pelaksana kebijakan yang kurang baik dilihat dari rendahnya koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Balangan dengan pemerintah Desa Gunung Riut selain itu kerjasama antara Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) tergolong kurang baik dalam hal memberikan informasi program kepada kelompok tani yang ada di Desa Gunung Riut, koordinasi antara Tim Teknis Kabupaten dengan Tim Teknis Provinsi kurang baik dalam bertukar informasi untuk mengatasi permasalahan penyesuaian data penerima bantuan yang bertujuan untuk Penetapan lokasi dan penerima manfaat. *Ketiga*, pada aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia yang kurang baik karena petugas pelaksana tergolong terbatas dilihat dari ketersediaan jumlah petugas yang terbatas untuk pembagian tugas pendataan lapangan yang kewalahan untuk melakukan pensortiran data di masyarakat desa selain itu peran dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) juga belum optimal sebagai fasilitator layanan pemenuhan bibit, pupuk maupun sarana prasarana pertanian diketahui sumber daya di Desa Gunung Riut terbatas karena hanya 1 orang yang bertugas mendampingi penyuluh pertanian yang juga 1 orang, sumber daya finansial tergolong cukup baik karena bantuan yang diterima masyarakat penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yakni Rp. 85.000.000,- per unit pekarangan yang menjadi kawasan pertanian, sumber daya prasarana kurang baik karena prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pertanian belum ada seperti unit traktor dan lainnya diketahui untuk Desa Gunung Riut juga mendapatkan bantuan alat semprot hama, pupuk dan bibit. *Keempat*, pada aspek karakter institusi implementor meliputi kemampuan melaksanakan program yang kurang baik dikarenakan beberapa tahapan kegiatan kurang terlaksana seperti tahapan penumbuhan, tahapan pengembangan dan tahapan kemandirian semua tahapan tersebut kurang terlaksana di seluruh desa objek penerima bantuan yakni Desa Gunung Riut dan tugas fungsi cukup baik dilihat dari petugas dalam pelaksanaan program KRPL ini cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program KRPL tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan meliputi faktor pendorong yakni tersedianya anggaran program Program Kawasan Rumah Pangan Lestari yang diterima kelompok tani masing-masing Rp. 85.000.000,- kemudian informasi yang cukup memadai dalam proses pendataan pada Desa Gunung Riut diketahui informasi yang diterima petugas sudah cukup memadai dan mencukupi untuk pelaksanaan Program KRPL tersebut, kemudian faktor penghambat meliputi masih ada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan dikarenakan keterbatasan anggaran menjadikan pengalokasian dana menjadi tidak menyeluruh untuk bantuan terhadap masyarakat diketahui Desa Gunung Riut ada 8 Orang anggota kelompok tani yang menerima bantuan, minimnya sosialisasi program bantuan karena hanya dilakukan secara online kepada aparat desa dan masyarakat hanya dilakukan pendataan, kemudian Desa Gunung Riut juga 1 kali sosialisasi yang dilaksanakan, tingginya angka kemiskinan masyarakat desa dikarenakan sebagian masyarakat Desa tergolong dalam masyarakat yang berpenghasilan rendah diketahui di Desa Gunung Riut tingkat pendapatan masyarakat yang mayoritas petani antara Rp. 1.500.000,- sampai dengan 2.500.000,- dan pengawasan yang kurang efektif terhadap proses pendataan masyarakat miskin penerima bantuan hingga penyaluran bantuan disebabkan kerjasama dan koordinasi yang

rendah antara pemerintah dengan aparat desa setempat dan pembinaan yang kurang dilakukan dilihat dari pembinaan terhadap petani pada Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan dan Tahap Kemandirian kurang optimal dan cuaca yang kurang mendukung dalam kegiatan pertanian sehingga menyebabkan penanaman bibit menjadi tidak dapat terealisasi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2021. Peraturan Bupati Balangan Nomor 59 Tahun 2021 tentang penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Tani, Dan Kelembagaan Ekonomi Tani.

_____. 2014. Aktor dan Pelaku Kebijakan Publik. Tersedia: <http://coretanduniapendidikan.blogspot.co.id/2014/11/aktor-dan-pelaku-kebijakan-publik.html> (18 Mei 2024)

AG. Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anggara, Sahya, 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta: Pustaka Setia.

Affrian, R. (2022) 'Pemberdayaan Kelompok Tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong', *Administraus*, 6(3), pp. 98–111.

Anshari, M.R. (2021) 'KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 4(2), pp. 304–323.

Arlan, A.S. (2022) 'KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN', *Al'iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2023) 'Kinerja Dinas Perpustakaan Untuk Peningkatan Minat Membaca Masyarakat Tapin', *Administraus*, 7(3), pp. 20–26.

Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.

Berkatillah, A., Baihaqi, A. and Rahman, A.A. (2023) 'PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3005–3015.

Febriadi, H. (2021a) 'DISIPLIN KERJA APARATUR PADA KANTOR DESA TAMBALANG RAYA KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 3(1), pp. 40–52.

Febriadi, H. (2021b) 'MOTIVASI PIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Administraus*, 5(1), pp. 1–17.

Febriadi, H. (2021c) 'UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM KERJA PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.', *Al'iidara Balad*, 3(2), pp. 40–57.

Noorrahman, M.F. (2023) 'Peran Komunikasi Antar Budaya terhadap Adaptasi Mahasiswa Perantau di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai', *TASHWIR*, 11(02), pp. 137–148.

Noorrahman, M.F., Sairin, M. and Janati, J. (2023) 'PERAN DUKUNGAN SOSIAL DALAM MENGURANGI PRASANGKA SOSIAL PADA MAHASISWA BARU YANG BERSTATUS SEBAGAI MAHASISWA PENDATANG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), pp. 1751–1756.

- Oktavianty, P.A. *et al.* (2023) ‘Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI “GUSI”)', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) ‘PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN’, *Al’iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Mujahadah, S. (2023) ‘PENGARUH MUTASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al’iidara Balad*, 5(1), pp. 18–24.
- Setiawan, I. (2022) ‘Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 15(2), pp. 331–339.
- Setiawan, I. (2023) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara’, *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) ‘Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Trio, S. *et al.* (2023) ‘Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province’, *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William. 2015. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Herabudin, 2016, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Cet.Pertama, Bandung: Pustaka Setia
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2013. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran*, Yogyakarta: Y.A.P
- Jumiati. 2023. “*Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan*”. STIA Amuntai
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Suplirahim. 2013. *Implementing Public Policy*. Tersedia: <http://akpsuplirahim2013.blogspot.co.id/2013/05/implementasi-kebijakan-publik-edward-iii.html> (18 Mei 2024)

Tim Penyusun Buku. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. STIA Amuntai. Edisi Revisi.

Yowanita, Sefni. 2016. *Jenis-Jenis Kebijakan*. Tersedia: http://sefniyowanita.blogspot.co.id/2016/10/jenis-jenis-kebijakan_2.html (30 September 2023)

Yuliana. 2022. *“Implementasi Program Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan”*. STIA Amuntai